

**Faktor yang mempengaruhi Penentuan Upah dan Prediksi Upah Minimum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008**

*Influencing Factor Determination of Fee and Prediksi UMP
Provinsi of Bangka Belitung Archipelago Year 2008*

Hamsani¹
Universitas Bangka Belitung

Abstract

The determination how great the Minimum Wage of Province (UMP) is a very complex problem because it involves so many parts and interest. A reasonably comfortable life need Consumer Price Index (IHK), a rate of company development, a region economical growth, common wage and labour market condition are several factors influencing the determination of wage rate. A good indicator in Determining the wage is its profitability to reach a reasonably comfortable life need more than 100% ideal. How's about the wage condition of Bangka Belitung Province in 2008?

Keyword : Minimum Wage Provinsi (UMP) , Price Index Consumer (IHK)

Pendahuluan

Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2007 untuk Bangka Belitung sebesar Rp. 720.000,- perbulan. Hasil keputusan Dewan Pengupahan tersebut telah ditandatangani dan disahkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan diberlakukan untuk tahun 2007. Adalah wajar, apabila angka tersebut telah menimbulkan *pro* dan *kontra* berbagai pihak, terutama 2 pihak yang sangat berkepentingan yaitu : Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Gabungan Serikat Perburuhan Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pihak pengusaha menginginkan upah yang dibayarkan kepada para pekerja serendah mungkin, karena upah merupakan *cost* bagi pengusaha sedangkan bagi pekerja, upah yang diterima diharapkan setinggi mungkin, sebab upah bagi seorang pekerja merupakan *income* (pendapatan).

Upah mempunyai peranan yang strategis, karena upah yang diterima oleh pekerja merupakan salah satu unsur kesejahteraan disamping jaminan sosial dan berbagai fasilitas lainnya.

Pembayaran upah kepada tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua pengertian; *gaji* dan *upah*. Dalam pengertian sehari-hari *gaji* diartikan sebagai pembayaran kepada para pekerja/karyawan tetap dan tenaga kerja profesional seperti PNS, dosen tetap, pimpinan perusahaan, karyawan bank dsb. Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali. Sedangkan *upah* dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah dan pembayarannya berdasarkan harian atau mingguan. Seperti tukang kayu, buruh bangunan, pekerja pertanian termasuk penerima upah. Dalam teori ekonomi *upah* diartikan sebagai (*pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha, Nopirin : 130*). Dengan demikian, dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran kepada pekerja tetap dan tidak tetap, kedua jenis pendapatan pekerja tersebut dinamakan *upah*.

Dalam jangka panjang, *sejumlah tertentu* upah pekerja akan mempunyai kemampuan yang semakin sedikit di dalam membeli barang-barang dan jasa. Hal tersebut timbul sebagai akibat dari kenaikan harga-harga barang dan jasa, yang selalu berlaku dari waktu ke waktu. Kenaikan

¹⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Email ::hamsani@ubb.ac.id. Telp. 0717-435702. Fax. 0717-435706

harga akan menurunkan daya beli dari sejumlah tertentu pendapatan. Dalam jangka panjang juga, kecenderungan yang selalu berlaku adalah keadaan dimana harga-harga barang maupun upah terus menerus mengalami kenaikan. Tetapi kenaikan tersebut tidaklah serentak dan juga tingkat kenaikannya berbeda. Walaupun demikian, secara teoritis tidaklah sulit untuk mengetahui sampai dimana kenaikan upah/pendapatan mampu mengimbangi kenaikan harga-harga bahkan yang kita harapkan merupakan suatu gambaran dari kenaikan kesejahteraan (barangkali?) yang dirasakan oleh semua pihak terutama pekerja.

Kerangka Teoritis

Menurut Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada (enam) faktor yang mempengaruhi penentuan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

1. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pasal 1 ayat 1 : *(Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya di singkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan hidup layak, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, RI : 7). KHL itu sendiri terdiri atas 7 (tujuh) komponen, yaitu :*

a. Makanan dan Minuman yang terdiri dari :

1. Beras
2. Sumber protein (daging, ikan, telur)
3. Kacang-kacangan (tempe, tahu)
4. Susu
5. Gula Pasir
6. Minyak goreng curah
7. Sayuran
8. Buah-buahan (setara dengan pepaya/pisang

9. Karbohidrat lain (setara tepung terigu)

10. Teh atau kopi
11. Bumbu-bumbuan

b. Sandang meliputi ;

1. Celana panjang/rok
2. Kemeja lengan pendek
3. Kaos oblong/BH
4. Celana dalam
5. Sarung/kain panjang
6. Sepatu
7. Sandal jepit
8. Handuk mandi
9. Perlengkapan ibadah

c. Perumahan

1. Sewa kamar
2. Dipan/tempat tidur
3. kasur dan bantal
4. Meja dan kursi
5. Lemari pakaian
6. Sapu
7. Perlengkapan makan (piring, gelas, sendok)
8. Ceret aluminium
9. Wajan aluminium
10. Panci aluminium
11. sendok masak
12. kompor minyak tanah
13. minyak tanah
14. ember plastik
15. listrik
16. bola lampu pijar/neon
17. Air bersih
18. Sabun mandi

d. Pendidikan

- Bacaan/Radio

e. Kesehatan/Sarana Kesehatan

1. Pasta gigi
2. Sabun mandi
3. sikat gigi
4. sampho
5. Pembalut/alat cukur
6. Obat anti nyamuk
7. potong rambut/cukur

f. Transportasi

- Transport kerja lainnya

g. Rekreasi dan Tabungan

1. Rekreasi
2. Tabungan

Dari 7 (tujuh) komponen tersebut dirinci lagi menjadi 46 (empat puluh enam) item. KHL mencakup komponen kebutuhan, kualitas/kriteria, jumlah kebutuhan, satuan, harga satuan dan nilai

sebulan. Harga barang/jasa untuk KHL diperoleh melalui survey yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini survey KHL akan dilakukan hanya **di Pangkalpinang**

Dalam penentuan Upah minimum yang berdasarkan KHL, upah ditentukan berdasarkan prosentase (%) tertentu dari KHL, misalnya 80%, 85% atau 90% dari KHL dan pencapaian KHL bertahap tidak harus sekaligus (100%).

2. Indeks Harga Konsumen (IHK)

IHK merupakan perkembangan rata-rata harga barang-barang secara umum dari dari suatu periode ke periode berikutnya (biasanya bulanan atau tahunan). Selisih IHK dari suatu periode ke periode berikutnya sering identik dengan inflasi. Inflasi merupakan indikator keadaan harga di pasar, sehingga inflasi juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi harga suatu barang yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi upah. Besarnya perkembangan inflasi bisa dalam angka positif atau negatif. Jika IHK periode sebelumnya lebih besar daripada periode selanjutnya, maka pertumbuhan inflasi negatif dan sebaliknya.

3. Komponen Perkembangan dan Kelangsungan Perusahaan

Keadaan perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan pada suatu daerah/provinsi tertentu dapat mempengaruhi penentuan upah di daerah/provinsi tersebut. Jika perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan mengalami kenaikan, maka upah yang akan ditetapkan akan mengalami kenaikan dari periode sebelumnya, dan sebaliknya.

4. Upah yang berlaku pada umumnya.

Upah mempunyai peranan yang strategis, karena upah yang diterima oleh pekerja merupakan salah satu unsur kesejahteraan disamping jaminan sosial dan berbagai fasilitas lainnya.

Dalam hal ini, peneliti juga akan membandingkan upah minuman yang berlaku di daerah lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau dan sebagainya. Upah yang berlaku di daerah/provinsi lain akan berdampak terhadap penentuan upah di provinsi Bangka Belitung, meskipun keadaan perekonomian dan kondisi andalan daerah berbeda. Hubungan tingkat upah di suatu daerah / provinsi dengan daerah / provinsi lain adalah positif, artinya jika upah di suatu daerah/provinsi mengalami peningkatan, maka upah di daerah/provinsi yang lain akan ikut mengalami kenaikan.

5. Kondisi Pasar Kerja

Secara teoritis, kondisi pasar kerja dapat mempengaruhi tingkat upah. Hubungan antara tingkat pengangguran dengan kenaikan tingkat upah adalah negatif, sehingga jika suatu daerah/provinsi tingkat pengangguran mengalami kenaikan, maka prosentase kenaikan tingkat upah mengalami penurunan dan sebaliknya. Kondisi pasar kerja hampir sama dengan pasar barang/jasa, yang proses harga keseimbangan juga ditentukan oleh faktor *demand* dan *supply*. Namun pemerintah harus menentukan upah minimum untuk menyelamatkan pekerja dari terpuruknya upah yang akan diterima oleh pekerja jika tingkat permintaan tenaga kerja melampaui batas ketidakwajaran sementara jumlah penawaran sangat terbatas. Pada saat itu, upah pasti sangat rendah. Upah minimum bertujuan untuk menyelamatkan pekerja.

6. Tingkat Perkembangan perekonomian dan Perkapita

Besarnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) akan mempengaruhi penentuan upah. Karena semakin tinggi perkapita (merupakan besarnya PDRB dibagi dengan jumlah penduduk) semakin

besar tingkat upah yang akan ditetapkan dan sebaliknya.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui :

Bagaimana kondisi upah minimum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2007?

Apa saja faktor-faktor yang menjadi indikator penentuan upah?

Berapa persenkah penerapan upah terhadap KHL (Kebutuhan Hidup Layak)?

Menentukan prediksi tingkat upah tahun 2008?

Metodologi Penelitian

Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan :

Data Primer :

data utama yang dihasilkan melalui survey di pasar tradisional Kota Pangkalpinang untuk mendapatkan harga barang-barang kebutuhan.

Data sekunder :

data pendukung yang diperoleh dari beberapa literatur yang relevan dengan penelitian

Metode pengumpulan data

Studi lapangan.

Untuk mendapatkan data terutama data primer, peneliti melakukan survey ke lokasi penelitian

Studi pustaka

Yaitu dengan mempelajari bahan/literatur yang relevan dengan penelitian.

Metode analisis data

Adapun metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif

Analisis dan Pembahasan

Secara kuantitatif, besarnya UMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu mengalami kenaikan.

Berikut data UMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2003-2007

Tabel. 1
UMP Kep. Bangka Belitung 2003-2007

TAHUN	UMP
2003	Rp 379.500
2004	Rp 447.923
2005	Rp 560.000
2006	Rp 640.000
2007	Rp 720.000

Sumber : Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bila dibandingkan dengan provinsi wilayah Sumatera, UMP Provinsi Bangka Belitung masih berada di atas rata-rata.

Berikut ini tingkat UMP di Provinsi Se-Sumatera dapat dilihat pada **Tabel 2** berikut ini:

Tabel. 2
Upah Minimum
Provinsi Se-Sumatera 2007

NO.	PROVINSI	UMP
1	Nanggoe Aceh. D	Rp 850.000
2	Sumatera Utara	Rp 761.000
3	Sumatera Barat	Rp 750.000
4	Riau	Rp 710.000
5	Kep. Riau	Rp 805.000
6	Jambi	Rp 658.000
7	Sumatera Selatan	Rp 662.000
8	Bangka Belitung	Rp 720.000
9	Bengkulu	Rp 644.838
10	Lampung	Rp 555.000
	Rata-rata	Rp 711.584

Sumber : Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Untuk menghasil KHL (Kebutuhan Hidup Layak) seorang lajang di Kota Pangkalpinang, berikut hasil survey

Peneliti di Pasar induk kota Pangkalpinang, yang telah dilakukan pada tanggal 6 Mei 2007 jam 9.00 – 12.00.

Tabel. 3
KHL Untuk Pekerja Lajang Dalam Sebulan dengan 3.000 K/hari
Di Kota Pangkalpinang

No.	Komponen	Kualitas/ Kriteria	Jumlah Keb.	Satuan	Harga	Nilai Sebulan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I	MAKANAN DAN MINUMAN					
	1. Beras	Sedang	10,00	Kg	5.500	55.000
	2. Sumber protein :					
	a. Daging Sapi	Sedang	0,75	Kg	60.000	45.000
	b. Ikan Segar	Baik	1,20	Kg	20.000	24.000
	c. Telur Ayam	Telur ayam ras	1,00	Kg	9.200	9.200
	3. Kacang-kacangan :					
	Tempe/Tahu	Baik	4,50	Kg	8.000	36.000
	4. Susu kental	Sedang	0,90	Kg	14.000	12.600
	5. Gula pasir	Sedang	3,00	Kg	7.000	21.000
	6. Minyak goreng	Curah	2,00	Kg	7.000	14.000
	7. Sayuran	Baik	7,20	Kg	5.000	36.000
	8. Buah-buahan	Baik	7,50	Kg	8.000	60.000
	9. Sumber karbohidrat	Sedang	3,00	Kg	1.500	4.500
				Dus isi		
	10. Teh	Celup	1,00	25	2.500	2.500
	Kopi	Sachet	4,00	75 gram	3.000	12.000
	11. Bumbu-bumbuan	(Nilai 1 s/d 10)	15,00	%		49.770
JUMLAH I						381.570
II	SANDANG					
	12. Celana panjang/rok	Katun sedang	½	Potong	50.000	25.000
	13. Kemeja lengan panjang/blus	setara katun	½	Potong	40.000	20.000
	14. Kaos oblong/BH	Sedang	½	Potong	12.000	6.000
	15. Celana dalam	Sedang	½	Helai	7.000	3.500
	16. Sarung/kain panjang	Sedang	1/12	Potong	35.000	2.917
	17. Sepatu	Kulit sintetis	1/6	Pasang	80.000	13.333
	18. Sandal jepit	Karet	1/6	Pasang	7.500	1.250
		100 cm x 60				
	19. Handuk mandi	cm	1/12	Potong	30.000	2.500
	20. Perlengkapan ibadah	Sajadah, mukena	1/12	Paket	100.000	8.333
JUMLAH II						57.833

III PERUMAHAN						
21. Sewa kamar	Sederhana	1	1 bulan	150.000	150.000	
22. Dipan/tempat tidur	no. 3 polos	1/48	Buah	200.000	4.167	
23. Kasur dan bantal	Busa	1/48	Buah	150.000	3.125	
24. Sprei dan sarung bantal	Katun	1/6	Set	75.000	12.500	
25. Meja dan kursi	1 meja/4 kursi	1/48	Set	150.000	3.125	
26. Lemari pakaian	Kayu sedang	1/48	Buah	300.000	6.250	
27. Sapu	Ijuk sedang	1/6	Buah	12.000	2.000	
28. Perlengkapan makan						
a. Piring makan	Polos	¼	Buah	2.500	625	
b. Gelas minum	Polos	¼	Buah	2.500	625	
c. Sendok dan garpu	Sedang	¼	Pasang	2.500	625	
29. Ceret alumunium	ukuran 25 cm	1/24	Buah	40.000	1.667	
30. Wajan alumunium	ukuran 32 cm	1/24	Buah	40.000	1.667	
31. Panci alumunium	ukuran 32 cm	1/6	Buah	40.000	6.667	
32. Sendok masak	Aluminium	1/12	Buah	10.000	833	
33. Kompor minyak tanah	16 sumbu	1/24	Buah	85.000	3.542	
34. Minyak tanah	Eceran	10	Liter	5.000	50.000	
35. Ember plastic	isi 20 ltr	1/6	Buah	20.000	3.333	
36. Listrik	450 watt	1	Bulan	20.000	20.000	
	25 watt/15					
37. Bola lampu pijar/neon	watt	¼	Buah	7.500	1.875	
38. Air bersih	standar PAM	2	mtr kbk	5.000	10.000	
39. Sabun cuci	Cream/deterjen	1,5	Kg	8.000	12.000	
JUMLAH III					294.625	
IV PENDIDIKAN						
40. Bacaan/radio	Tabloid	4	Eks	7.500	30.000	
JUMLAH IV					30.000	
V KESEHATAN						
41. Sarana Kesehatan						
a. Pasta Gigi	80 gram	1	Tube	5.000	5.000	
b. Sabun mandi	81 gram	2	Buah	1.500	3.000	
c. Sikat Gigi	produk lokal	¼	Buah	2.500	625	
			Btl 100			
d. Shampo	produk lokal	1	ml	7.500	7.500	
e. Pembalut /pisau cukur	produk lokal	1	bks/buah	3.000	3.000	
42. Obat anti nyamuk	Baker	3	Dus	2.000	6.000	
43. Pangkas rambut	tk cukur/salon	½	kali	9.000	4.500	
JUMLAH V					29.625	
VI TRANSPORTASI						
44. Transport kerja dan lainnya	angkutan umum	30	hari (PP)	4.000	120.000	
JUMLAH VI					120.000	

REKREASI DAN						
VII TABUNGAN						
45. Rekreasi	daerah sekitar	1/6	kali	15.000	2.500	
46. Tabungan					18.323	
(2% dari nilai 1 s/d 45)						
JUMLAH VII						20.823
JUMLAH I+II+III+IV+V+VI+VII						934.476

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Tahun 2007

Dari tabel 3 di atas, besarnya KHL untuk kota Pangkalpinang (didata bulan Mei 2007) sebesar Rp. 934.476. Sedangkan UMP Rp. 720.000. Ini berarti UMP hanya mampu dilaksanakan sebesar 77,05% (Rp. 720.000/Rp.934.476). Meskipun pencapaian KHL bertahap, namun untuk tahun 2007, pencapai KHL sebesar 77,05% dianggap bukan *starting* yang baik, karena untuk provinsi di luar Provinsi Bangka Belitung pencapaian KHL sudah di atas 80%. Keberhasilan peranan upah salah satunya dapat dilihat dari kemampuan upah tersebut dalam mencapai KHL, semakin tinggi prosentase pencapai KHL semakin baik. Idealnya pencapaian KHL harus di atas 100%, sehingga para pekerja mempunyai kemampuan *saving* atau mempunyai uang untuk berjaga-jaga lebih besar.

Pertumbuhan Ekonomi

Pada awal tahun 2007, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu disebabkan oleh melemahnya sektor pertambangan, khususnya pertambangan inkonvensional sedangkan sektor perkebunan terutama karet dan sawit belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Lada yang pernah menjadi primadona, juga hampir-hampir tidak terdengar gemanya. Lemahnya laju pertumbuhan perekonomian untuk tahun 2007 yang diperkirakan di bawah 4%, merupakan salah satu indikator lemahnya kemampuan sektor perusahaan dalam

memberikan upah. Bahkan banyak perusahaan yang terpaksa mem-PHK-kan karyawannya.

Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat tinggi, baik pengangguran yang berasal dari daerah setempat (pengangguran lokal), maupun pengangguran yang datang dari luar Provinsi Bangka Belitung. Mengacu kepada angka pengangguran tahun sebelumnya, pada tahun 2004, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat angka pengangguran mencapai 24.155 orang. Kalau setiap tahun pertambahan tingkat pengangguran 10%, sudah dapat dipastikan pada tahun 2007 jumlah pengangguran sudah di atas 30.000 orang. Peneliti berasumsi, angka pengangguran tahun 2007 jauh di atas angka tersebut, bisa mencapai 50.000 orang. Semakin tinggi angka pengangguran, semakin rendah tingkat upah yang diberikan pengusaha kepada para pekerja.

Perkembangan Jumlah Perusahaan

Meningkatnya jumlah pengangguran dan rendahnya laju pertumbuhan perekonomian, akan melemahkan daya beli masyarakat, sehingga dapat dipastikan perkembangan jumlah perusahaan pasti tidak mengalami peningkatan, bahkan bisa jadi mengalami penurunan. Karena banyak perusahaan yang tidak sanggup bertahan pada kondisi yang serba sulit. Menurut fakta, hanya UKM

(Usaha Kecil Menengah) yang mampu *survive* bak ilalang yang bergoyang ditiup angin, namun tidak membuat ilalang rebah ke tanah. Ilalang dapat segera bangkit manakala tiupan angin mulai melemah.

Dari data BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2006 jumlah perusahaan sebanyak 885 buah meningkat sekitar 8,9% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 813 buah. Menurut peneliti, pada tahun 2007, jumlah perusahaan tidak mengalami penambahan bahkan menurun sekitar 2% (tutup usaha sekitar 18 buah perusahaan). Hal ini merupakan kabar buruk bagi pencari pekerja. Perkembangan perusahaan merupakan salah satu faktor penentu besarnya tingkat upah. Semakin tinggi perkembangan jumlah perusahaan, semakin besar peluang pekerjaan yang tersedia, tentu semakin tinggi pula upah yang dapat ditawarkan.

Bagaimana perkembangan UMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2003-2007.

Tabel. 4
Perkembangan UMP
Kep. Bangka Belitung 2003-2007

Tahun	UMP	Perubahan		% Perubahan
		Angka		
2003	Rp 379.500	-	-	-
2004	Rp 447.923	Rp 68.423		18,03
2005	Rp 560.000	Rp 112.077		25,02
2006	Rp 640.000	Rp 80.000		14,29
2007	Rp 720.000	Rp 80.000		12,50

Sumber : Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari Tabel 4 di atas, jelas bahwa kenaikan UMP terjadi pada tahun 2005 sebesar 25,02% dari tahun sebelumnya. Kenaikan terendah terjadi pada tahun 2007 hanya sebesar 12,5%. Hal tersebut disebabkan berbagai kondisi seperti lesunya perekonomian, lemahnya laju pertumbuhan perusahaan, harga yang tidak menentu, dan sebagainya.

Lalu bagaimana kondisi UMP Provinsi Bangka Belitung bila kita bandingkan dengan UMP Provinsi Se-sumatera?

Lihat Tabel 5 di bawah ini, bila kita bandingkan UMP Kepulauan Bangka Belitung dengan UMP Se-Sumatera untuk tahun 2007, UMP Kepulauan Bangka Belitung termasuk urutan ke-5 terbesar (Provinsi NAD, Kep. Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung). Nilai UMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada di atas rata-rata UMP Se-sumatera, namun hal ini jangan dianggap sesuatu yang menggembirakan, karena Kebutuhan Hidup Layak di Bangka Belitung juga sangat tinggi.

Tabel. 5
UMP Se-Sumatera tahun 2007

NO.	PROVINSI	UMP	Ranking
1	Nanggroe Aceh. D	Rp 850.000	1
2	Sumatera Utara	Rp 761.000	3
3	Sumatera Barat	Rp 750.000	4
4	Riau	Rp 710.000	6
5	Kep. Riau	Rp 805.000	2
6	Jambi	Rp 658.000	7
7	Sumatera Selatan	Rp 662.000	9
8	Bangka Belitung	Rp 720.000	5
9	Bengkulu	Rp 644.838	8
10	Lampung	Rp 555.000	10
Rata-rata		Rp 711.584	-

Sumber : (<http://HRD-Forum.com>), data diolah

UMP Tahun 2008?

Kalau kita mengacu kepada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penentuan UMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2007 yang telah dibahas di atas, maka UMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2008 memang akan mengalami kenaikan, namun kenaikannya lebih rendah dari tahun 2007, hanya sekitar 10% saja. Hal ini menggambarkan kondisi perekonomian Bangka Belitung tahun 2008 kurang menggairahkan. Angka pengangguran dan inflasi masih tinggi serta laju pertumbuhan

ekonomi dan perkembangan perusahaan masih rendah, masih mewarnai peta perekonomian Bangka Belitung.

Namun secara statistik, dengan menggunakan linier sederhana, besarnya angka UMP tahun 2008 dapat diprediksi, tentu hasil perhitungan ini hanya secara teoritis saja.

$$a = \frac{2.747.424}{5} = 549.485$$

$$b = \frac{873.077}{10} = 87.308$$

Tabel 6.
Data UMP Provinsi Bangka Belitung
tahun 2003-2007

Tahun	UMP (Y)	X	XY	X ²
2003	Rp 379.500	-2	- 759.000	4
2004	Rp 447.923	- 1	- 447.923	1
2005	Rp 560.000	0	0	0
2006	Rp 640.000	1	640.000	1
2007	Rp 720.000	2	1.440.000	4
Σ	2.747.423	0	873.077	10

Sumber :Dewan Pengupahan Provinsi Babel, data diolah

Dalam penelitian ini, menggunakan analisis regresi sederhana untuk perhitungan UMP tahun 2008. Detail perhitungan sebagai berikut :

Rumus regresi sederhana : $Y = a + bX$

Dimana ;

Y = Jumlah UMP yang diprediksikan

X = Tahun perencanaan UMP

a = Konstanta dari UMP pada setiap tahun

b = Tingkat perkembangan UMP tiap tahun, juga merupakan arah slope dari arah perkiraan UMP

$$a = \frac{\Sigma Y}{n} \quad \text{Sedangkan} \quad b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$$

$$Y_{2008} = 549.485 + 87.308 (3)$$

$$= 549.485 + 261.924$$

$$= 811.409$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka besarnya UMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2008 sebesar Rp. 811.409, naik sebesar Rp. 91.409 atau naik sebesar 12,7%. Hasil perhitungan agak sedikit berbeda dengan perhitungan sebelumnya yang diprediksi hanya mengalami kenaikan maksimal 10% (Rp. 72.000) sehingga menjadi Rp. 792.000,-.

Sehingga selisih perhitungannya :

$$\mathbf{Rp. 19.049,00} = (811.049 - 792.000).$$

Simpulan

Banyak faktor yang mempengaruhi penentuan UMP, musyawarah berbagai pihak yang kompeten sangat berpengaruh dalam hal ini.

Pencapai upah terhadap KHL diprovinsi Bangka Belitung masih rendah, baru mencapai 77,05%.

UMP Provinsi Kep. Bangka Belitung tahun 2008 akan mengalami kenaikan hanya 10%, masih di bawah kenaikan tahun sebelumnya.

Referensi

- BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2005, Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka.
- Nopirin, Ph.D, 2004, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, BPFE Yogyakarta
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I., 2005, Pedoman dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.
- Samsubar Saleh, 1999, Soal Jawab Statistik, UPP AMP YKPN Yogyakarta